

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2017. *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang*. Kencana. Jakarta.
- A. Z. Abidin. 1987. *Asas-asas Hukum Pidana Bagian Pertama*. Alumni. Bandung.
- Amiruddin, Zainal Asikin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Andi Hamzah. 2014. *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Revisi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Djulaeka, Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Scopindo Media Pustaka. Surabaya
- Dominikus Rato. 2014. *Hukum Adat di Indonesia (Suatu Pengantar)*. Laksbang Justitia. Surabaya.
- E. Y. Kanter, S. R. Sianturi. 1982. *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*. Alumni AHM-PTHM. Jakarta.
- Eko Murdiyanto. 2020. *Sosiologi Pedesaan Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta Press. Yogyakarta.
- Gunsu Nurmansyah, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Natropologi*. Aura. Bandar Lampung.
- Hilman Hadikusuma. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum Adat*. Mandar Maju. Bandung.
- I Dewa Made Suartha. 2015. *Hukum Dan Sanksi Adat (Perspektif Pembaruan Hukum Pidana)*. Setara Press. Malang
- I Gede A. B. Wiranatha. 2005. *Hukum Adat Indonesia Perkembangannya dari Masa ke Masa*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Irwansyah. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Skripsi*. Mirra Buana Media. Yogyakarta.
- Lilik Mulyadi. 2015. *Hukum Pidana Adat : Kajian, Asas, Teori, Norma, Praktik, dan Prosedur*. PT Alumni, Bandung.

- M. Said Karim, Heranah. 2016. *Buku Ajar Delik-delik Di Dalam Kodifikasi*. Pustaka Pena Press. Makassar.
- Mohammad Jamin, dkk. 2014. *Peradilan Adat : Pergeseran Politik Hukum (Perspektif Undang-undang Otonomi Khusus Papua)*. Graha Ilmu : Yogyakarta.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Relevansi Hukum Pidana Adat Dalam Pembaruan Hukum Pidana Nasional*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Rosdalina Bukido. 2017. *Hukum Adat*. Deepublish. Yogyakarta.
- Rumokoy & Maramis. 2014. *Pengantar Ilmu Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta
- Siska Lis Sulistiani. 2021, *Hukum Adat di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Soerojo Wignjodipoero. 1983. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. PT Gunung Agung. Jakarta.
- Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Deepublish : Jakarta
- Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*. Alfabeta. Bandung.
- Tueku Mansur Muttaqien. 2018. *Hukum Adat (Perkembangan dan Pembaruannya)*. Syiah Kuala University Press. Banda Aceh.

Jurnal

- Achmad Surya, Suhartini. Efektivitas Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Lembaga Adat (Sarak Opat). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum. 2019. Volume 26 Nomor 1.
- Ahmad Irzal Fardiansyah, dkk. "Pengakuan Terhadap Hukum Pidana Adat Di Indonesia". Jurnal Bina Mulia Hukum. September 2019. Volume 4 Nomor 1.
- Dewa Made Rasta. Tindak Pidana Adat Di Bali dan Sanksi Adatnya. Jurnal Yustitia. 2019. Volume 13 Nomor 2.
- Galuh Praharafi Rizqia, Dimas Sutawijaya. Penyelesaian Perkara Pidana Persetubuhan Dengan Pelaku Anak Pada Masyarakat Hukum Adat

Dayak Lundayeh Di Kabupaten Malinau. Jurnal De Jure. 2021. Volume 13 Nomor 1.

Hepy Krisman Laia, Muhammad Yasid & Solistis Dachi. Analisis Hukum Pidana Adat Nias Dalam “Menyelesaikan Kasus Pencurian” (Studi di Desa Tuindrao Kecamatan Amandraya Kabupaten Nias Selatan), Jurnal Retenrum, 2020. Volume 1 Nomor 02.

Maria Ulfah. Sanksi Adat Sebagai Sanksi Pidana Dalam Hukum Positif dan Ius Constituendum. Veritas et Justitia. 2018. Volume 6 Nomor 1

Nofil Gusfira, Suhartini. Pelaksanaan Pidana Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekeraan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Bener Meriah. Resam Jurnal Hukum. 2020. Volume 6 Nomor 1.

Patricia Pasapan, dkk. Delik Adat dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia. Tatohi. April 2022. Volume 2 Nomor 2.

Suharyo. Perlindungan Hukum Pertanahan Adat Di Papua Dalam Negara Kesejahteraan. Jurnal Rechts Vinding. Desember 2019. Volume 8 Nomor 3.

Skripsi

Boby Subiyanto. 2019. Penyelesaian Percobaan Pemerkosaan Dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Pidana (Studi Kasus Desa Kasiro Kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun). Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin. Jambi.

Febri Prayoga. 2019. Pembuktian Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Muhammadiyah Palembang. Palembang.

Muh Ruslan Afandy, 2016, “Analisis Hukum Terhadap Eksistensi Sanksi Adat A’Massa Pada Delik Silariang Di Kabupaten Jeneponto (Studi Kasus di Desa Kapita, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto)”. Skripsi, Sarjana Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin

Rae Netha Junaedy. 2016. Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay Di Kota Jayapura. Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sigit Harsito. 2020. Penjatuhan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Kajang *Ammatoa* (Studi Kasus di Kabupaten Kajang, Kabupaten Bulukumba). Skripsi. Sarjana Hukum. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat Di Papua

Keputusan Musyawarah Dewan Adat Suku Mamta-Tabi Tahun 2018 tentang Kelembagaan Dewan Adat Mamta/Tabi

Website

Andri Mahakam. 2018. "Peradilan Adat : Alternatif Bagi Para Pencari Keadilan di Daerah Masyarakat Hukum Adat". <https://vivajusticia.law.ugm.ac.id/2018/02/28/peradilan-adat-alternatif-bagi-para-pencari-keadilan-di-daerah-masyarakat-hukum-adat/#>, diakses pada tanggal 23 Maret 2023 pukul 17.55 WITA.

Kamus. 2016. Pada KBBI Daring. Diambil 1 September 2022, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kamus>.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. 2022. "Presiden Jokowi : Pemekaran Wilayah Papua Untuk Pemerataan Pembangunan", <https://www.menpan.go.id/site/berita-terkini/dari0istana/presiden-jokowi-pemekaran-wilayah-di-papua-untuk-pemerataan-pembangunan>. Diakses pada tanggal 2 September 2022 pukul 22.44 WITA.

Mahkamah Konstitusi RI. 2022. "DPR : UU Otsus Papua Berikan Kewenangan Lebih Luas Bagi Rakyat Papua". <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17857&menu=2>. Diakses pada tanggal 2 September 2022 pukul 19.50 WITA.

LAMPIRAN

